

Hikmah Ramadan

Menegakkan Islam 'Wasathiyah'

Prof Dr Rochmat Wahab MPd MA

ISLAM diturunkan di bumi melalui Rasulullah SAW awalnya hanya satu bentuk, yaitu *Islam rahmatan lil'alamin*. Setelah mengalami perjalanan panjang, kini ada *Islam wasathiyah* dan Islam radikal dan Islam liberal. Islam radikal dan Islam liberal yang tumbuh di Indonesia menghadirkan persoalan sosial, sehingga muncul keresahan dan ketidaktenangan di tengah-tengah kehidupan umat. Padahal setiap umat sangat merindukan hidup tenang, damai dan bahagia, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia.



Kitab! Janganlah kamu berlebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus."

Sikap radikal dalam berislam secara berlebihan memang tidak dibenarkan, bahkan sewajarnya saja. Karena berislam radikal yang wajar masih bisa diterima, sebagaimana ungkapan *linnii muslimuuni* yang merefleksikan rasa *self identity*. Hal ini perlu ditampilkan kepada orang lain dengan tetap respek kepada yang lain tanpa ada rasa superior. Juga tidak boleh menganggap inferior orang atau umat lain. Bahkan kita juga tidak dibenarkan memaksa orang lain untuk mengikuti agama dengan cara paksa. *Laa ilaha illa Allah*.

Islam *Wasathiyah* juga diyakini mampu menghadirkan rasa damai, jalan lurus, dan hidup seimbang dunia dan akhirat, kepentingan personal dan kolektif. Karena di balik Islam *Wasathiyah* ada nilai-nilai keadilan, keadilan, kasih sayang, toleransi dan sebagainya. Yang semuanya terbingkai dalam Islam *Rahmatan Lil'alamin*. Walaupun Islam *Wasathiyah* itu pilihan yang terbaik untuk Indonesia, tapi supaya kontra produktif, jangan sampai Islam *Wasathiyah* itu dalam implementasinya dengan cara doktrinasi. Upaya yang tepat adalah kebijakan dan programnya dilakukan melalui cara yang dialogis dan lebih menuju ke arah pencerahan.

Akhirnya bahwa dengan menghadirkan Islam *Wasathiyah* diharapkan mampu berkontribusi dalam menciptakan umat Islam Indonesia yang rukun, toleran dan mampu menegakkan rasa keadilan, yang damai dan jauh dari konflik dan tekanan yang diidolai oleh Allah SWT. Kita sangat berharap gerak pemerintah bersama-sama masyarakat dan ormas Islam *mainstream* untuk suksesnya kebijakan moderasi agama. Jika perlu ormas lebih dominan bergerak, sementara pemerintah memfasilitasi. Dengan begitu Islam *wasathiyah* dapat eksis dan fungsional. Semoga! (*)

(Prof Dr Rochmat Wahab MPd MA, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNY dan Pengurus Pusat ICMI 2015-2020, dan Anggota Musytasar PWNU DIY 2016-2021)

Kita melihat fenomena, banyak orang yang merasa menguasai ilmu agama Islam dengan menunjukkan penolakannya terhadap orang Islam lainnya yang tidak mampu menunjukkan perilaku ibadahnya sesuai dengan dirinya dikatakan salah, bahkan kafir. Demikian juga ada umat Islam yang bertindak liberal terhadap ajaran agama, sehingga dengan berani berpendapat beda dengan sejumlah hukum syaria. Akibatnya melanggar hukum yang ada dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Pada hal di mata Allah SWT, hendaknya kita berpegang pada ajaran Islam *wasathiyah*. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS Al Baqarah:143, yang artinya iDan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) iumat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".

KH Maifur Amin sebagai Ketua MUI berpendapat bahwa Islam *Wasathiyah* adalah model ekspresi dan pemahaman yang relevan dalam bingkai kenegaraan di Indonesia. Artinya, Islam tengah dan moderat sebagai pemahaman ajaran Islam yang menggunakan empat kaidah. Pertama, santun, tidak keras dan tidak radikal. Kedua, suka rela, tidak memaksa dan tidak mengintimidasi. Ketiga, toleran, tidak egois dan tidak fanatis. Terakhir, saling mencintai, tidak saling bermusuhan dan membenci.

Sikap tegas ini sangat penting, bahkan kita tidak boleh berlebihan dalam beragama, sehingga menunjukkan sikap radikal. Allah SWT berfirman pada QS Al Maidah:77, yang artinya iKatakanlah (Muhammad), Wahai Ahli

OPERASIONAL BIY HANYA 5 JAM

Jelang Larangan Mudik, Penumpang Pesawat Meningkat

KULONPROGO (KR) - Jumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Yogyakarta/Yogyakarta International Airport (BIY/YIA) di Temon, Kulonprogo, terus mengalami peningkatan menjelang penerapan larangan mudik.

Pelaksana Tugas Sementara (PTS) General Manager (GM) BIY Agus Pandu Purnama mengatakan, peningkatan pergerakan penumpang terjadi hingga 58 persen. "Menjelang larangan mudik 6-17 Mei 2021, jumlah penumpang di BIY sejak 28 April 2021 memang meningkat. Saat itu ada peningkatan 30 persen dibanding hari biasa dan Minggu ini kenaikan mencapai 58 persen," kata Agus Pandu, Selasa (4/5).

Diungkapkan, tren peningkatan penumpang di BIY pada 28 April mencapai 3.000 orang padahal hari-hari biasa hanya sekitar 1.500 penumpang. Sebagai antisipasi, pihaknya telah mempersiapkan skema termasuk penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19 baik bagi petugas maupun para penumpang.

"Pada 6 Mei 2021 nanti, jam operasional BIY diubah menjadi hanya lima jam saja yakni pukul 07.00-12.00 WIB. Sedangkan

hari-hari biasa bandara beroperasi dari pukul 07.00-19.00 WIB atau 11 jam," tegas Pandu.

Diingatkan pula penumpang yang datang harus bebas Covid-19 karena dalam waktu 1x24 jam penumpang wajib tes GeNose maupun antigen.

Berdasarkan data, jumlah penumpang yang datang ke BIY, Selasa (4/5) sebanyak 3.645 orang, dengan angka keberangkatan 2.490 penumpang.

Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I Handy Heryudhitiawan di Jakarta juga mengakui, menjelang periode larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, khususnya menjelang akhir pekan akhir April lalu, PT AP I mencatat peningkatan trafik penumpang. Pada Jumat 30 April trafik penumpang di 15 bandara di bawah PT AP I sebanyak 103.854 pergerakan penumpang, meningkat 16 persen dibanding trafik penumpang pada hari sebelumnya (Kamis, 29 April) yang sebanyak 89.307 pergerakan penumpang. "Trafik penumpang sebanyak 103.854 pergerakan penumpang tersebut terdiri 53.552 kedatangan dan 50.302 keberangkatan," ujar-nya. (Rul/Imd)-d

PENYEKATAN DI PERBATASAN DIY

Pelanggar Diminta Putar Balik

YOGYA (KR) - Jajaran Pemda DIY terus meningkatkan koordinasi menjelang pemberlakuan kebijakan larangan mudik. Harapannya, kebijakan Pemerintah Pusat untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 tersebut bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY selain menerjunkan 96 personel untuk mendukung jajaran Kepolisian saat melakukan penyekatan di wilayah perbatasan DIY, juga menyiagakan 328 petugas di destinasi wisata di DIY.

"Kebijakan larangan mudik sudah menjadi kesepakatan yang harus ditaati seluruh anggota masyarakat. Sebagai bentuk komitmen dari hal itu, warga yang kedapatan melanggar aturan larangan mudik akan diminta putar balik. Kebijakan ini diberlakukan bagi yang melewati jalur utama maupun jalan alternatif," ujar Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Selasa (4/5).

Noviar juga berpesan agar kegiatan yang berpotensi memicu terjadinya kerumunan dihindari. Karena menjelang Hari Raya Idul Fitri ada kecenderungan mobilitas

masyarakat meningkat. "Saya minta masyarakat di DIY untuk sementara waktu menahan diri tidak bepergian keluar daerah. Begitu pula sebaliknya yang ada di luar DIY, selama kebijakan larangan mudik diberlakukan tidak usah datang ke DIY dulu. Kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti di pusat-pusat perbelanjaan atau pasar sebaiknya juga dihindari," pesan Noviar.

Sementara bagi para pengalau atau orang yang bekerja di wilayah perbatasan diperkenankan melintasi pos penyekatan dengan catatan harus membawa surat keterangan yang ditandatangani atasannya, disertai surat keterangan bebas Covid-19 hasil tes GeNose maupun anti-ge. Sedangkan untuk mengantisipasi adanya travel gelap yang membawa pemudik, penindakan akan dilakukan jajaran Kepolisian.

Kepala Dinas Perhubungan (Dis-hub) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, pihaknya siap mendukung upaya penyekatan pemudik. Dishub DIY bersama Polri, Satpol PP dan Dishub Kabupaten/Kota se-DIY telah mempersiapkan strategi pelarangan mudik.

"Kami sudah menyiapkan strategi penyekatan perjalanan mudik berlapis dan sudah menentukan titik-titik penyekatan. Personel Dishub memiliki tugas yang kompleks seperti memantau volume arus lalu lintas yang masuk dan mengatasi traffic. Karena itu tugas kami melakukan pemantauan baik dari pos ataupun patroli," jelasnya.

Ni Made mengatakan, pihaknya akan melakukan beberapa kegiatan yaitu membuka pos pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas di empat sektor, posko monitoring penumpang di terminal, stasiun maupun bandara, posko pemantauan dan pengendalian lalu lintas di 10 titik, serta pemantauan arus lalu lintas di DIY di jalur utama dan jalur alternatif. (Ria/Ira)-f

AMANKAN BARANG TERKAIT DUGAAN SUAP

KPK Kembali Geledah Kediaman Azis

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang yang diduga terkait kasus suap dari pengeledahan rumah pribadi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

"Kemarin tim penyidik telah selesai melaksanakan pengeledahan rumah kediaman pribadi milik AZ (Azis Syamsuddin) di tiga lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan. Dalam proses pengeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang yang diduga terkait dengan perkara," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (4/5).

Pengeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap untuk

tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan kawan-kawan. "Selanjutnya bukti ini segera dilakukan validasi serta verifikasi untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara dimaksud," ujar Ali.

Sebelumnya, pada Rabu (28/4), KPK juga telah mengeledah ruang kerja Azis, di Gedung DPR RI dan rumah dinas Azis di Jakarta Selatan. Tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan bukti-bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan kasus.

Selain Stepanus, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Walikota Tanjungbalai M Syah-

rial (MS) dan Maskur Husain (MS) selaku pengacara. Dalam konstruksi perkara disebut pada Oktober 2020, Syahrial menemui Azis di rumah dinas di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemkot Tanjungbalai.

Azis langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar Stepanus dapat membantu permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti KPK. (Ant)-f

FOKUS RENCANA KERJA TAHUN 2022

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Istana Negara, Selasa (4/5).

Kepala Negara mengingatkan, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, belanja pemerintah juga harus dipercepat, terutama untuk program bantuan sosial dan padat karya. Selain itu, sisi permintaan juga harus diperbesar dengan mendorong belanja masyarakat. "Saya sudah mengingatkan, di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp 182 triliun, yang seharusnya ini segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," ujarnya.

Sektor industri, imbuh Presiden, juga harus didorong agar mulai bangkit

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Domestic supply side harus ditingkatkan, tetapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan ditawar-tawar mengenai ini," tegasnya.

Di sisi lain, Presiden mengungkapkan, pemerintah telah melakukan reformasi struktural secara besar-besaran dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, ia meminta semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.

"Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik," tuturnya.

Presiden juga meminta jajarannya memperkuat ekonomi hijau atau green economy karena Indonesia adalah salah satu paru-paru terbesar dunia yang potensi kekayaannya hutan mangrove dan hutan tropisnya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global.

Terkait hal ini, pemerintah telah merencanakan pembangunan kawasan industri hijau (green industrial park) di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower dari Sungai Kayan. Pembangkit listrik ini nantinya akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Presiden menilai ini adalah kekuatan Indonesia ke depan.

"Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversity di laut. Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki," imbuhnya. (Sim)-f

Belum Semua RT di DIY Miliki Satgas Covid-19

YOGYA (KR) - Penambahan jumlah kasus Covid-19 di DIY yang masih fluktuatif perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk Satgas Kalurahan maupun RT/RW. Karena Satgas Kalurahan maupun RT/RW selain lebih mengetahui kondisi di lapangan, juga memiliki peran sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap warganya. Apalagi berdasarkan evaluasi, terdapat penambahan zona oranye dan merah di tingkat RT.

"Berdasarkan data dan laporan yang kami terima, sampai saat ini belum semua RT di DIY memiliki Tim Gugus Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19. Padahal keberadaan mereka sangat penting dalam melakukan pengawasan maupun pencegahan penyebaran Covid-19. Mudah-mudahan persoalan itu bisa segera diselesaikan dan semua RT di DIY memiliki Satgas Covid-19," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Selasa (4/5).

Menurut Noviar, penegakan protokol kesehatan (prokes) dan pencegahan penularan Covid-19 akan bisa dilaksanakan dengan baik jika ada kesadaran dari semua pihak. Untuk mewujudkan hal itu kesadaran masyarakat dalam penegakan prokes menjadi sangat penting. Supaya koordinasi lebih mudah, keberadaan Satgas Covid-19 di level RT/RW menjadi sangat penting, sayangnya hal ini belum optimal. Karena belum semua RT di DIY memiliki Satgas Covid-19. (Ria/Ira)-d



PROMO HARI RAYA: Sejumlah warga memilih sandal dan sepatu baru di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1442 H, sejumlah toko terutama yang menawarkan promo menarik dan potongan harga, ramai didatangi konsumen.

BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi

JAKARTA (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang tinggi yang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 4 - 6 Mei 2021.

"Potensi gelombang dengan kategori sangat tinggi 4 - 6 m berpeluang terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Tengah dan Samudra Hindia selatan Jawa Timur," ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/5).

Selain itu menurut pantauan BMKG, perairan gelombang dengan kategori sedang 1,25 - 2,5 m berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan Pulau Sawu - Kupang - Samudra Hindia selatan Rotte - Kupang, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Natuna utara, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kep. Wakatobi bagian barat, perairan Manui - Kendari bagian timur, Laut Flores, perairan Kep. Sermata - Kep. Babar, perairan Kep. Sangihe - Talaud, Laut Sulawesi, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan selatan Kep. Kei - Kep. Aru, Laut Arafuru bagian timur, perairan utara Papua barat, Samudra Pasifik utara Halmahera - Papua.

Sementara, untuk gelombang dengan kategori tinggi 2,5 - 4 m terjadi di beberapa perairan Indonesia di antaranya perairan barat Mentawai - Kep. Mentawai, perairan Enggano - barat Lampung, Samudra Hindia barat Sumatra, Selat Sunda, Samudra Hindia selatan Banten - Jawa Barat, perairan selatan Banten - P. Sumba, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Samudra Hindia Bali - Sumba. (Ant)-d